



**LAPORAN KEPALA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI DIY
PADA ACARA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA PADA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Yth. Ketua BPK RI Bapak Hadi Purnomo

Yth Anggota V BPK RI Bapak Sapto Amal Damandhari

Yth. Gubernur DIY Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Yth. Sekretaris Jenderal BPK RI Bapak Hendar Ristriawan

Yth. Tortama V Bapak Sutrisno

Yth. Walikota Yogyakarta

Yth. Bupati Bantul

Yth. Bupati Sleman

Yth. Bupati Gunung Kidul

Yth. Bupati Kulon Progo

Yth. Forum Koordinasi Pemerintah Daerah

Yth. Para Pimpinan Instansi Vertikal

Serta para undangan yang kami hormati

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

Mengawali sambutan ini, marilah bersama – sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman anantara BPK RI dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di wilayah DIY tentang “PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA”.

Bapak Ketua BPK RI serta hadirin yang kami hormati

Pada pagi hari ini merupakan hari yang sangat penting bagi BPK RI Perwakilan DIY dengan Pemerintah Daerah se wilayah DIY, yaitu dilaksanakannya acara penandatanganan nota kesepahaman tentang PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA, hal ini menandai dimulainya babak baru dalam penyelenggaraan negara kita khususnya di daerah, yaitu dengan digunakannya teknologi informasi yang disebut e-Audit yang merupakan sistem yang memanfaatkan sinergi antara sistem informasi internal BPK RI (e-BPK) dengan informasi internal milik entitas pemeriksaan (e-Auditee), dimana sinergi ini semakin kuat dan membentuk sebuah komunikasi data secara online antara e-BPK dan e-Auditee yang sistematis membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK RI. Hal ini berkaitan dengan upaya terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan Negara/daerah, sekaligus meningkatkan sistem kerja yang lebih efisien dan efektif .

Bapak Ketua BPK RI serta hadirin yang kami muliakan

Kami laporkan bahwa acara penandatanganan nota kesepahaman ini dapat terwujud tidak lepas dari dukungan yang tidak terhingga dari Gubernur dan para Bupati serta Walikota beserta jajarannya di wilayah DIY.

Persiapan pelaksanaanya didahului dengan melakukan kunjungan pertemuan sekaligus untuk menjelaskan tentang e-Audit serta pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman tersebut kepada Bapak Gubernur DIY disusul kegiatan yang dilakukan dengan Walikota Yogyakarta, Bupati Bantul, Kulon Progo, Sleman terakhir Bupati gunung Kidul. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengirim personil dari BPK RI Perwakilan DIY guna melakukan pertemuan dengan jajaran pemerintah daerah untuk membahas draft nota kesepahaman dan melihat kesiapan IT.

Setelah beberapa kali diadakan pertemuan alhamdulillah akhirnya telah disepakati isi draft nota kesepahaman tersebut dan dapat diinventarisir kesiapan IT dari masing – masing pemda.

Bapak Ketua BPK RI serta hadirin yang kami hormati

Berdasarkan inventarisasi kesiapan IT pemerintah daerah, kami laporkan bahwa Pemerintah Provinsi DIY, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul aplikasi yang digunakan adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun pada tahun 2010 dengan mendapat bantuan dari kementerian Dalam Negeri. Sedangkan Kabupaten Bantul menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Daerah yang berbasis dekstop sehingga tidak online dan Kabupaten Kulon Progo dalam tahap uji coba Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dari BPKP.

Sebelum mengakhiri laporan ini, kami mencoba untuk menampilkan demo proses log in ke jaringan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Proses penginputan sistem ini

oleh Provinsi DIY baru dimulai awal 2011 sehingga masih terbatas data – data yang dapat diakses. Untuk itu kami tampilkan beberapa contoh contoh yang ada;

[....Demo Aplikasi]

Bapak Ketua Yang Terhormat, selanjutnya kami mohon ijin melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA dan mohon kesediaan Bapak untuk menyaksikan penandatanganan ini.

Akhirnya dengan memohon ridlo Allah SWT, semoga apa yang kita rencanakan dan lakukan ini dapat memberi manfaat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan transparan dapat tercapai sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, khususnya rakyat di wilayah Yogyakarta.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua, Bapak Anggota, Bapak Gubernur, Bapak Sekjen, Bapak Tortama V, Bapak/Ibu Bupati dan Walikota serta para tamu undangan lainnya atas kehadirannya pada acara ini.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa kami sampaikan pula terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggarakannya acara ini serta mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini.

Sekian, terima kasih.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 05 Mei 2011
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROPINSI DIY
KEPALA,

SUNARTO
NIP. 19590514 198601 1 001